

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kawasan Amerika Latin adalah sebuah kawasan yang dinamis. Hal ini nampak sekali dari mulai kehadiran bangsa-bangsa barat semenjak beberapa abad yang lampau, kemudian proses kolonialisasi dan penjajahan, sebagai ajang perebutan wilayah kekuasaan dari berbagai negara asing, hingga akhirnya mereka mendapatkan kemerdekaannya, seperti misalnya negara Bolivia yang mendapatkan kemerdekaan dari Spanyol pada 6 Agustus 1825.

Di kawasan yang cukup dinamis ini tentu saja terjadi dinamika masyarakat yang cukup menarik untuk dianalisa. Mulai dari kekacauan iklim politik, kudeta, demonstrasi besar-besaran, termasuk fenomena ajaib yaitu kemiskinan yang melanda wilayah yang sebenarnya amat kaya ini tanpa habis-habisnya, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pergolakan dalam pemerintahan yang silih berganti dalam berbagai negara di belahan bumi Amerika Latin ini. Bolivia sendiri telah mengalami lebih dari 200 kudeta, kontrakudeta dan pemberontakan jalanan hanya dalam 180 tahun kemerdekaanya.¹ Sebuah fenomena politik yang cukup fantastis dan menarik untuk diamati.

Fenomena yang sedang hangat-hangatnya merebak yaitu bergesernya sebagian besar negara di Amerika Latin, ke arah yang cenderung kiri ini, termasuk yang baru-baru ini dilakukan Bolivia dengan kebijakannya yang cukup berani yaitu menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di wilayah ini, merupakan masalah yang sebenarnya cukup kompleks dan tentunya layak untuk diamati secara lebih mendalam.

Proses nasionalisasi Bolivia di bawah Presiden Evo Morales ini tidak terjadi begitu saja semudah membalikkan telapak tangan, namun perjuangan akan hal ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Perjuangan rakyat Bolivia untuk mendapatkan kembali hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka namun terampas oleh privatisasi atas sumber-sumber utama perekonomian ini dilakukan secara dinamis. Berbagai macam unjuk rasa dan demonstrasi baik secara halus maupun dengan kekerasan dan ancaman telah juga mereka lakukan. Bahkan tak jarang hingga merenggut beberapa korban jiwa.

Dengan melihat dari fakta-fakta yang dijelaskan diatas, maka penulis menetapkan **“Nasionalisasi Perusahaan Asing di Bolivia Pada Masa Presiden Evo Morales”** sebagai judul dari tulisan ini.

B. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan sedikit menganalisa kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintahan Bolivia dibawah kepemimpinan Presiden Evo Morales

terutamanya adalah kebijakannya dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara Bolivia tersebut. Mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial ini dan bagaimana implikasinya bagi negara tersebut, secara lebih mendalam, rinci dan obyektif.

Tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hubungan internasional dan pada bidang ilmu yang lain secara umumnya.

Dan tentunya tak kalah pentingnya penulisan ini adalah juga ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Sejak kemerdekaan Bolivia dari penjajahan Spanyol pada tahun 1825, Bolivia telah berpuluh-puluh kali mengalami pergantian presiden dengan berbagai corak pemerintahan pula, mengingat negara ini termasuk negara yang sangat rawan konflik internal.

Perkembangan perekonomian Bolivia juga senantiasa mengalami pasang surut. Berbagai kebijakan dibuat oleh para presiden yang berkuasa.

Perekonomian Bolivia yang buruk menuntut para pemimpinnya untuk

membuat berbagai kebijakan demi kemajuan dan perbaikan keadaan di Bolivia yang cukup memprihatinkan ini.

Sejak tahun 1982, Bolivia sesungguhnya telah tergolong dalam negara demokratis dengan pemerintahan yang dipimpin oleh sipil. Namun para pemimpin Bolivia ini tetap saja menghadapi banyak masalah, yaitu sekali lagi kemiskinan yang mendalam dan konflik sosial lainnya. Untuk itulah berbagai sistem perekonomian coba diterapkan oleh para presiden Bolivia.

Sebenarnya sistem liberalisasi ekonomi telah masuk ke negara ini sejak dari dahulu, namun sistem ekonomi liberal pasar bebas secara nyata diterapkan di Bolivia baru pada masa pemerintahan Presiden Víctor Paz Estenssoro (1985-1989). Pemerintahannya selalu bekerjasama dengan IMF dalam menyelesaikan berbagai masalah perekonomian.

Pada dekade 80-an ini Bolivia melepaskan kontrol kekayaan minyak, yaitu setelah IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara ini.² Pada tahun 1986 Estenssoro berusaha melakukan perbaikan ekonomi sederhana. Ia juga membantu tentara Amerika Serikat dalam mengurangi produksi koka dan penjualan kokain pada tahun 1988. Namun usaha ini tidak begitu berhasil karena ditentang oleh sebagian besar penduduk asli Bolivia.

Kemudian pada masa Presiden Jaime Paz Zamora yang terpilih pada tahun 1989 untuk menggantikan Estenssoro dan berkuasa sampai tahun

² <http://www.kompas.com/kompas-cetak/061020/10/20/07/2057121.htm>, akses 23 November 2006

1993, pemerintahan mulai mempromosikan sistem ekonomi pasar bebas, yaitu pada pertengahan tahun 1990.

Selanjutnya kebijakan pro liberalis kapitalis semakin nampak jelas pada kekuasaan di bawah Presiden Gonzalo Sánchez De Lozada. Presiden ini berkuasa sejak tahun 1993-1997 dan kemudian dapat menduduki kursi kepresidenan kembali pada tahun 2002-2003.

Di bawah pemerintahan Lozada ini, ia menerapkan program kapitalisasi secara besar-besaran. Ia bekerja sama secara aktif dengan para investor asing. Bahkan ia membagi sebesar 50% kepemilikan (saham) dan kendali manajemen atas perusahaan-perusahaan negara kepada para investor asing. Misalnya saja perusahaan perminyakan, sistem telekomunikasi, penerbangan, perusahaan jalur perkeretaapian dan listrik menjadi di bawah investasi kapitalis.³

Kemudian pada akhir tahun 1990 sebuah pipa gas alam dibuat untuk menyalurkan gas alam ke Brazil. Lozada juga pernah mengusulkan pembangunan pipa untuk gas alam ke Chile. Bahkan pada tahun 1997 perusahaan milik pemerintah *Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos* (YPFB) juga ia privatisasi, namun pada tahun 2004 perusahaan tersebut berhasil direnasionalisasi.

Kemudian kebijakan serupa berlanjut pada masa kepresidenan Jenderal Hugo Banzer. Sebenarnya ia pernah berkuasa di Bolivia pada 22 Agustus 1971 hingga 21 Juli 1978 namun hanya secara de facto dan

³ <http://en.wikipedia.org/wiki/Bolivia>, akses 03 Oktober 2006

inkonstitusional melalui beberapa kudeta yang ia lakukan sejak tahun 1970. Barulah kemudian ia menjabat sebagai presiden secara konstitusional sejak 6 Agustus 1997 hingga 7 Agustus 2001 melalui kemenangannya dalam pemilu bersama partai ADN (*Accion democrática Nacionalista*).

Pada dasarnya pemerintahan Hugo Banzer ini melanjutkan kebijakan pasar bebas dan privatisasi seperti yang telah dijalankan oleh para pendahulunya. Pada akhir tahun 1997, dengan dukungan dari Amerika Serikat ia membuat program yang disebut 'Dignity Plan' yang bertujuan membasmi produksi koka yang selama ini dijalankan oleh penduduk Indian lokal.⁴ Kebijakan ini telah menyebabkan penurunan income yang besar pada Bolivia.

Pada April 2000, Banzer menandatangani kontrak dengan Betcel untuk memprivatisasi perusahaan suplai air minum di Cochabamba. Kontrak ini membuat perusahaan MNC *Aguas del Tanari* mengambil alih dan melakukan privatisasi perusahaan air minum tersebut. Privatisasi ini telah menyebabkan kenaikan tarif air hingga 65%.⁵

Pada tanggal 1 juli 2001 Banzer mengundurkan diri dari kursi kepresidenan karena penyakit kanker paru-paru yang dideritanya. Pemerintahan Bolivia kemudian diselesaikan oleh wakil presiden yaitu Jorge Fernando Quiroga Ramfrez. Kebijakannya juga tak jauh berbeda. Ia lebih memilih melanjutkan kebijakan pendahulunya. Quiroga sendiri bahkan

⁴ http://www.workmall.com/wfb2001/bolivia/bolivia_history_transition_to_democracy.html, akses 21 september 2006

⁵ <http://www.majalahsaksi.com/news/index.php?im=&ID=6>, akses 21 September 2006

pernah bekerja sebagai konsultan bagi Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Selain itu, sebanyak 76 kontrak minyak sudah ditandatangani pada masa kekuasaan Jorge Quiroga dan Lozada, dan hal ini telah menguntungkan 12 perusahaan multinasional diantaranya termasuk Enron, Shell, Repsol-YPF, Petrobas, British Petroleum dll. Mereka dimudahkan untuk membeli langsung minyak mentah di sumur-sumur minyak di Santa Cruz di bawah nilai pasar, dan kemudian menjualnya kembali kepada rakyat Bolivia 12 kali dari harga aslinya. Inilah salah satu penyebab naiknya harga bahan bakar minyak diesel, petrol dan kerosene di Bolivia.

Kemudian pada perkembangan yang selanjutnya pada masa presiden Gonzalo Sanchez de Lozada yang kedua kalinya ini, ia membuat keputusan hendak menandatangani kesepakatan yang mengharuskan gas Bolivia dijual di bawah harga pasar kepada Amerika Serikat. Juga diberlakukannya privatisasi air tahun 2003 yang menyebabkan kenaikan tarif hingga 300%.

Hingga pada 17 Oktober 2003, akhirnya Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada, tokoh liberal Bolivia pemenang Pemilu ini, diturunkan oleh demonstrasi rakyat dan digantikan oleh Carlos Mesa. Peristiwa itu dikenal sebagai 'Hantu Oktober'.

Pada pemerintahan selanjutnya yaitu masa presiden Carlos Mesa Gisbert. Mesa menduduki kursi kepresidenan Bolivia sejak 17 Oktober 2003 hingga 6 Juni 2005. Ia berkuasa menggantikan Lozada yang dimulihkan

rakyat dalam protes besar-besaran dalam kasus yang sering disebut sebagai 'Perang Minyak Bolivia' dalam peristiwa 'Hantu Oktober'.

Sebenarnya dalam Agenda Oktober 2003 Carlos Mesa telah menjanjikan kepada rakyat Bolivia untuk mengembalikan penguasaan kepada rakyat (merenasionalisasi) atas minyak dan gas, penjatuhan hukuman (pengadilan) terhadap politisi yang bertanggungjawab atas kematian 67 orang dalam pergolakan Oktober 2003, dan membentuk majelis konstituante untuk merevisi konstitusi dan membangun kembali Bolivia dengan partisipasi aktif atau dengan melibatkan masyarakat adat setempat (suku Indian) yang mayoritas.⁶

Namun hingga dalam 20 bulan kekuasaannya, Mesa tak satupun memenuhi janji tersebut. Pada bulan Desember 2004 Carlos Mesa malah membuat sebuah kesepakatan dengan IMF tentang privatisasi.

Akibatnya rakyat menjadi marah. Pada dasarnya, Presiden Mesa telah mencoba meredakan suasana dengan menawarkan tanggal referendum soal otonomi dan sekaligus pembentukan tim untuk mengamandemen UU Bolivia pada Oktober 2005. Presiden Mesa juga sudah mencoba mendekati para pemimpin gereja Katolik yang dinilai punya pengaruh kuat di Bolivia.⁷

Pajak pendapatan penjualan (royalti) terhadap kontrak production sharing minyak pernah ditetapkan oleh presiden Presiden Lozada sebesar 18%. Selanjutnya Carlos Mesa mulai berani membuat keputusan untuk menaikkannya menjadi 32% dalam UU Hidrokarbon yang baru disahkannya

⁶ http://www.prd-online.or.id/pbb/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=2, akses 03 Oktober 2006

pada tanggal 17 Mei 2005. Tentu saja kebijakan ini dibuat dalam rangka merebut kembali hati rakyat Bolivia yang sudah terlanjur tidak lagi percaya pada kredibilitas pemerintahannya. Namun, kebijakan tersebut tampaknya gagal untuk mengambil kembali hati rakyat Bolivia. Tuntutan mundur tetap bergulir dan juga tuntutan untuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak dan gas Bolivia.

Akibat dari demonstrasi besar-besaran terhadap dirinya akhirnya Mesa resmi untuk mengundurkan diri pada 6 Juni 2005. Sebelumnya Mesa pernah mencoba untuk mengundurkan diri pada 7 maret 2005 namun anggota kongress memilih secara mutlak untuk menolak tawaran tersebut sehari kemudian. Setelah pengunduran diri Mesa, kursi kepresidenan Bolivia kemudian digantikan sementara oleh Eduardo Rodrigues.

Kemudian Rodrigues mengusulkan untuk segera diadakannya pemilu awal. Dan diadakannya pemilu pada 18 Desember 2005 lalu itu telah membawa seorang Indian Aymara, Juan Evo Morales menduduki kursi kepresidenan Bolivia. Morales kemudian dilantik menjadi presiden pada 22 Januari 2006. Ia menang mutlak sebanyak sekitar 54% suara. Dan ini merupakan dukungan yang terbesar dibandingkan dengan dukungan terhadap presiden-presiden sebelumnya sejak dua dekade terakhir.⁸

Sebelumnya Morales pernah dipecat dari kursi kongres Bolivia, yaitu pada Januari 2002 terkait tuduhan terorisme yang berkaitan dengan berbagai kerusuhan di Bolivia. Morales merupakan mantan petani koka dan seorang

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales, 23 September 2006

anggota kongres yang berpengalaman. Gagasannya yang sangat berani yaitu mundur dari kebijakan ekonomi pasar bebas dan menentang kebijakan anti narkoba Amerika Serikat di Amerika Selatan.

Dalam kampanyenya, Morales menjanjikan sesuatu yang bahkan sangat berlawanan dengan kebijakan-kebijakan presiden Bolivia yang berkuasa sebelumnya. Morales menyerukan bahwa sumber daya alam tidak dapat diprivatisasi dan dikuasai oleh korporasi asing. Oleh karena itu, perlu diadakan renegotiasi atas seluruh kontrak karya pertambangan.

Morales merupakan presiden pertama Bolivia yang selama beberapa dekade terakhir berani menentang kepentingan dan kekuatan asing yang selama ini telah menguasai Bolivia, terutama terkait masalah sumber alam dan terhadap kasus yang menimpa para petani koka.

Setelah lima bulan menjadi presiden, Evo merealisasikan janjinya. Tanggal 1 Mei 2006 ia mengeluarkan Dekrit Presiden nomer 28701 tentang nasionalisasi industri minyak dan gas. Kemudian ia juga memerintahkan tentara dan ahli teknik dari perusahaan gas negara *Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos* (YPFB) untuk menduduki 56 ladang minyak dan gas yang berada di seluruh wilayah Bolivia.⁹

Ia kemudian memberikan tenggang waktu selama 180 hari atau 6 bulan bagi perusahaan-perusahaan asing tersebut untuk memperbaharui kontraknya dengan perusahaan milik pemerintah Bolivia YPFB. Jika ada

⁹ <http://ugunu.aksyateh.blogspot.com/2006/11/evo-morales-bukan-cuma-kib-dalauah.html>

diantaranya yang tidak setuju maka mereka dipersilahkan untuk meninggalkan Bolivia.

D. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas terutama dalam fenomena proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Bolivia yang dilakukan oleh Evo Morales ini termasuk sebuah keputusan yang dinilai cukup berani dan mengejutkan bagi banyak pihak.

Oleh karena itu muncul pertanyaan penting dan menarik yang perlu penulis analisis yaitu : **“Mengapa Presiden Evo Morales melakukan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan presiden-presiden Bolivia sebelumnya, yaitu melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Bolivia ?”**

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk melihat, meneliti, menjelaskan dan menganalisa kasus nasionalisasi perusahaan asing yang terjadi di Bolivia ini maka akan digunakan beberapa konsep dan teori. "Konsep" dapat didefinisikan sebagai abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu.¹⁰ Sedangkan "teori" berarti "melihat" atau "memperhatikan".¹¹

Dalam hal ini, teori adalah suatu pernyataan yang menjawab pertanyaan

¹⁰ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi LP3ES*, Jakarta, 1990, hal 92-97

¹¹ T. A. Coulumbis dan J. H. Wolfe, *Introduction to International Relations*, dikutip dalam Mochtar

"mengapa" untuk memberi makna pada fenomena yang terjadi. Pernyataan yang disebut teori ini berwujud dalam sekumpulan generalisasi. Karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, maka teori juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.

Dalam penulisan ini akan digunakan konsep Nasionalisasi, Teori Ketergantungan, Teori Persepsi dan Konsep Politik Luar Negeri.

1. Konsep Nasionalisasi

Nasionalisasi berarti pengambilalihan perusahaan bisnis asing dengan tujuan dijadikan milik nasional dan dibawah penguasaan pemerintah untuk penerapan kebijaksanaan negara. Nasionalisasi merupakan salah satu bentuk pengambil alihan harta kekayaan asing yang penting.¹²

Sedangkan menurut kamus Wikipedia, nasionalisasi adalah proses dimana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing untuk kemudian dijadikan perusahaan nasional. Apabila suatu perusahaan dinasionalisasi, maka negaralah yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu para pegawainya pun menjadi pegawai negeri atau pegawai pemerintahan.¹³

Pengambilalihan harta kekayaan asing ini sah jika memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu: untuk tujuan atau kepentingan umum dan tidak boleh karena alasan politik; dilakukan oleh organ yang berwenang, dengan itikad

¹² Burhan Tsani Mohd, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 51

¹³ <http://www.wikipedia.org/wiki/nasionalisasi.html>

baik; tidak sewenang-wenang atau semaunya sendiri dan tanpa diskriminasi; dengan pembayaran kompensasi.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan seorang kepala negara melakukan kebijakan nasionalisasi, yakni:

1. Negara membutuhkan dana atau biaya untuk pembangunan.
2. Kebijakan negara menghendaki adanya nasionalisasi.
3. Perusahaan asing dapat dijadikan pijakan bagi suatu negara untuk menjajah negara lain.
4. Perusahaan asing hanya akan mengalirkan devisa ke negara asing, yaitu negara asal perusahaan.
5. Perusahaan asing merupakan pintu terakhir kolonisasi.¹⁴

Selain beberapa hal diatas ada beberapa macam metode yang pernah digunakan di dunia untuk melakukan nasionalisasi yaitu:

1. Metode yang pertama adalah dengan jalan melakukan nasionalisasi secara langsung tanpa adanya re-negoisasi kontrak ataupun kompensasi. Situasi-situasi yang revolusioner dari massa rakyat sangat menunjang untuk pelaksanaan metode ini.
2. Jenis nasionalisasi yang kedua adalah penghentian sepihak kontrak yang sudah ada dan kemudian memberikan kompensasi atau ganti rugi. Jika kepentingan nasional mendesak dan merugikan, negara berhak melakukan secara sepihak pemutusan kontrak lalu memberikan kompensasi sepenuhnya untuk masa

kontrak yang belum dipenuhi. Tindakan penghentian kontrak karya di tengah jalan ini memungkinkan dibawanya negara ke arbitrase internasional. Namun demikian, hak ini dibatasi hanya untuk menentukan batas kompensasi yang wajar yang diakibatkan oleh “nasionalisasi atau pengambilalihan total dari hak kepemilikan perusahaan modal asing”. Hal ini dengan demikian hanya relevan pada kasus-kasus dimana terjadi pengambilalihan investasi seluruhnya dan secara langsung oleh negara, misalnya ketika pemerintahan mengambil alih operasi perusahaan modal asing dan menjadikannya milik negara.

3. Yang ketiga adalah dengan jalan mere-negoisasi kontrak kerjasama (Kontrak Karya dan Kontrak KPS/ *Kontractor Production Sharing*). Langkah inilah yang kemudian ditempuh Bolivia oleh Presiden Evo Morales. Perubahan dalam kontrak meliputi aspek peningkatan pembagian keuntungan termasuk juga pembagian saham, kejelasan konsep alih teknologi dan peningkatan pajak atau royalti.

Jika kebijakan yang dipilih adalah nasionalisasi dengan kompensasi, maka untuk pemberian kompensasi itu sendiri dalam hukum internasional diatur sedemikian rupa, yaitu aturan yang harus dilihat dari kedua sisi pihak yang terkait yaitu:

- a) Prompt (segera); setelah dinasionalisasi harus segera diberi kompensasi.
 - b) Adequate (memadai); seluruh kerugian dihitung, mulai dari saham, tanah, gedung, material, keuntungan dan lain-lain.
 - c) Effective, tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
2. Dilihat dari sisi host state :
- a) Kompensasi harus pantas, artinya kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi ekonomi negara yang bersangkutan.
 - b) Wajar, yaitu tidak harus segera dan tidak harus efektif. Dan kompensasi tersebut bisa dibayar dengan cara diangsur.¹⁵

2. Teori Ketergantungan

Pada dasarnya teori ketergantungan (*dependencia*) ini hendak menjelaskan mengenai persoalan kemunduran negara-negara bekas jajahan di dunia ketiga dengan melihatnya dalam konteks global. Perspektif ketergantungan menolak asumsi yang dibuat oleh para penganut modernisasi bahwa unit-unit analitis dalam memahami keterbelakangan adalah masyarakat nasional, jadi bersifat internal dan kultural masyarakat setempat. Menurut asumsi teori ketergantungan, hal itu bukanlah variabel kunci yang menjadi penyebab keterbelakangan di negara-negara tersebut.

dependencia menunjukkan bahwa penyebab itu lebih bersifat eksternal dan struktural.¹⁶

Analisa dari teori ketergantungan ini berfokus pada masalah penetrasi asing ke dalam ekonomi politik dunia ketiga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan pada negara-negara dunia ketiga. Dimana hal-hal tersebut diatas pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial politik yang gawat dan pada akhirnya mendorong timbulnya penindasan negara terhadap rakyat di masyarakat yang tergantung tersebut.

Seorang tokoh *Dependencia* André Gunder Frank secara ringkas membagi kelas perekonomian dalam negara metropolis dan negara satelit. Ia menekankan bahwa monopoli dan bentuk-bentuk kapitalis sebagai cara-cara ekonomi metropolis-metropolis untuk menarik surplus dari satelit-satelit ekonominya. Dengan demikian kapitalisme pada skala dunia mendorong pembangunan metropole dengan tanggungan satelit-satelit terbelakang.

Pembangunan kapitalisme ini menguntungkan semua kelas yang berasosiasi dengan modal internasional, termasuk petani lokal, kaum borjuis komersial, keuangan, dan industri yang bergerak dalam sektor internasional; namun ia menggerogoti kepentingan-kepentingan nasional seperti para wiraswastawan lokal. Konsekwensinya adalah perpecahan kepentingan ke dalam dualisme struktural di antara mereka yang berasosiasi dengan

Sementara mengenai bantuan ekonomi sebagai solusi dari negara maju, bagi kaum *dependencia* hanyalah merupakan jala bagi pengeksport modal ke negara-negara metropolitan, yang mengeksploitasi negara-negara satelit dengan berpura-pura bahwa kebijakan politik mereka sedang "membantu" mereka.

Frank juga berpendapat bahwa perubahan positif hanya dapat terjadi apabila negara-negara satelit, baik secara bersama-sama maupun secara terpisah, melepaskan diri dari penggabungan mereka menjadi perekonomian kapitalis dunia, dan hal ini pada gilirannya akan menuntut perubahan politik radikal diantara mereka. Frank menyatakan:

Hasil dari semua refleksi teoritis dan politis ini... adalah bahwa dengan partisipasi terus-menerus dalam sistem kapitalis dunia berarti melanggengkan keterbelakangan. Karena itu tidak akan ada keadilan, efisiensi maupun perkembangan ekonomi. Konklusi politiknya, karena itu, adalah dengan melepas hubungan dari sistem eksternal dan menyeberang ke sosialisme yang bersandar pada diri sendiri secara internal (atau beberapa kerjasama sosialis internasional yang tidak didefinisikan) dalam rangka membuat perkembangan ekonomi yang independen menjadi mungkin.¹⁹

3. Teori Persepsi

Teori persepsi yang digunakan dalam menganalisa kasus nasionalisasi perusahaan asing di Bolivia ini adalah perspektif dari dunia ketiga. Teori ini diikuti oleh pemikir-pemikir revolusioner dan fihak-fihak yang lebih militan di dunia ketiga. Mereka mempersalahkan kemiskinan pada kondisi-kondisi internasional berupa eksploitasi negara-negara miskin

¹⁹ Andre Gunder Frank, *The Mode Development of Development*, San Diego, 1979, p. 10.

oleh negara-negara maju. Mereka melihat negara-negara kaya mengambil keuntungan atas kerugian negara-negara miskin melalui investasi dan perdagangan luar negeri.

Pendapat teori pembangunan ini dalam persepsi negara dunia ketiga ini sangat bertentangan dengan teori konvensional menurut persepsi negara maju. Jika negara maju berpendapat mengenai penyebab dari keterbelakangan adalah ketidakefisienan internal dan jalan keluarnya adalah bantuan dari negara-negara maju, maka bagi penganut teori ini, penyebabnya adalah eksploitasi internasional oleh negara-negara maju, dan jalan keluarnya adalah perubahan mendasar atas hubungan internasional antara negara-negara kaya dan miskin. Obat yang ditawarkan oleh negara maju (bantuan teknis, investasi asing, perdagangan dan pinjaman) malah dianggap sebagai sumber penyakit bagi negara dunia ketiga. Bagi mereka itu adalah mekanisme pemeras yang secara sistematis menyedot kekayaan negara-negara berkembang.²⁰

Perekonomian dunia ketiga memasuki zaman pembangunan modern ini hanya sebagai subsistem kapitalisme dunia, setelah sekian lama dikuasai oleh kepentingan luar negeri dan dijadikan satelit ekonomi dari negara-negara maju yang dominan. Institusi ekonomi dasar negara-negara pinggiran yang tergantung dibentuk untuk memenuhi kebutuhan negara-negara industri, bukannya kebutuhan dan kepentingan lokal. Suatu perekonomian yang tergantung ditandai dengan ekspor komoditi-komoditi yang diperlukan

negara-negara industri dan impor berbagai produk dari negara-negara industri.

Pada periode awal, hal ini tumbuh dari kebutuhan negara-negara industri akan bahan-bahan mentah. Wilayah-wilayah terbelakang, yang ditakhlukkan dan dikuasai kekuatan militer superior negara-negara maju dijadikan pemasok bahan-bahan mentah, bahan tambahan, teh, karet, sebagai gudang cadangan minyak dll.

Perusahaan-perusahaan multinasional yang menurut persepsi negara maju adalah sebagai agen transfer modal dan teknologi bagi kemajuan negara-negara berkembang, maka bagi dunia ketiga hal ini nampak sebagai alat negara asing untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Karena pada hakikatnya pendapatan yang diperoleh dalam investasi ini akan dikirim kembali ke negara-negara maju dan tidak dijadikan dana investasi bagi dunia ketiga.²¹

Sejarah penjajahan Spanyol seabad lalu, telah menunjukkan bahwa penjarahan besar-besaran kekayaan bumi Bolivia yang berupa timah hanya untuk kepentingan kapitalis-kapitalis Spanyol, sedangkan orang-orang dari suku Indian, yang notabene merupakan penduduk asli mayoritas, tidak mendapatkan apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit sekali.

Hal ini terjadi pula dalam era neo-liberalisme. Sejak awal 1980-an kawasan Amerika Latin telah mengadopsi konsep kebijakan pasar bebas Amerika Serikat yang Neoliberal. Sayangnya banyak negara yang gagal

hanya Chile yang terhitung sukses. Kini 60 persen populasi Amerika Latin hidup miskin, 30 persen di antaranya miskin ekstrem. 40 persen pendapatan nasional diraup 10 persen terkaya, sedangkan 40 persen termiskin meraih hanya meraih 15 persen pendapatan nasional. Selama periode 1992-2001; 1,2 triliun dollar AS hanya digunakan untuk membayar hutang luar negeri. Namun, jumlah hutang malah meningkat dua kali lipat, dari 478,700 juta dollar AS (1992) menjadi 817,200 juta dollar AS (2001).²²

Disini Bolivia sebagai salah satu negara di Amerika Latin yang mencoba turut menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, malah mendapati bahwa negaranya adalah yang termiskin di kawasan Amerika Latin, bahkan tingkat penganggurannya malah naik menjadi 3 kali lipat, demikian juga dengan tingkat kematian bayi. Bahkan akibat dari kebijakan neoliberal yang telah diterapkan ini, kesenjangan sosial semakin melebar, tingkat kesejahteraan hidup penduduk asli Indian semakin rendah, dimana menurut laporan Bank Dunia pada 2004, 74 % masyarakat adat Indian Bolivia hidup di bawah garis kemiskinan.²³

Padahal Bolivia adalah sebuah negara dengan sumber daya alam yang melimpah, dari data badan energi Bolivia menyebutkan bahwa Bolivia merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar kedua di Amerika Latin, yaitu setelah Venezuela. Mereka memiliki cadangan gas alam sekitar 48,7 triliun meter kubik.

²² www.antiglobalisasi.com, 24-02- 2006, 19:08

²³ <http://coenpontohwordpress.com/2005/12/22/evomorales>

4. Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain.²⁴ Politik luar negeri suatu negara ditujukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara tersebut.

Setiap bangsa mempunyai aspirasi dan tujuannya sendiri. Untuk memenuhi tujuan dan aspirasi inilah negara menyusun politik luar negerinya. Namun kualitas dan keberhasilan suatu politik luar negeri tidak bergantung pada tujuan dari politik luar negeri itu sendiri namun, bergantung pada pelaksanaannya yang nyata. Dalam hal ini maka diperlukan metode politik luar negeri yang tepat.

Dalam kasus nasionalisasi perusahaan asing di Bolivia ini, Morales tidak saja "hanya" melawan sebuah kekuatan besar yang mengglobal yaitu perusahaan-perusahaan multinasional, lebih dari itu ia melawan sebuah sistem ekonomi neo-liberalis kapitalis dunia yang diterapkan oleh banyak negara-negara besar dunia. Oleh karena itu ia memerlukan dukungan dari banyak pihak untuk mendukung kebijakannya tersebut. Disini Morales menerapkan metode diplomasi sebagai metode yang baik dan efektif untuk mendapatkan dukungan internasional.

Kebijakan nasionalisasi ini terutama didukung oleh Venezuela dan Kuba. Selain itu juga didukung oleh beberapa negara di Amerika Latin lainnya seperti Brazil, Argentina, Chili, Nicaragua, Paraguay dan Kolombia.

²⁴ D. P. G. ...
24 D. P. G. ...
24 D. P. G. ...

Dukungan terhadap anti kapitalisme ini bahkan terlihat secara nyata dalam penolakan mereka terhadap FTAA/ ALCA (Kawasan Perdagangan bebas Amerika), sekaligus pendeklarasian dan penandatanganan ALBA (The Bolivarian Alternative for Americas) oleh Kuba, Bolivia, Venezuela, Brazil, Argentina dan Ekuador. ALBA adalah alternatif kerja sama Amerika Latin yang melawan intervensi pasar bebas Amerika Serikat, yang telah disepakati di Mar Del Plata Argentina pada November 2005.²⁵

F. Hipotesa

Kebijakan kontroversial Presiden Evo Morales untuk menasionalisasi perusahaan asing di Bolivia ini disebabkan dan didorong oleh beberapa faktor yaitu:

1. Adanya konflik sosial politik sebagai akibat dari keterbelakangan Bolivia yang terjadi karena keberadaan perusahaan-perusahaan asing di negara tersebut.
2. Persepsi pribadi Evo Morales yang nasionalis, sehingga ketika ia berkuasa maka ia menerapkan kebijakan yang pro nasionalis yaitu menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang terdapat di negaranya.
3. Adanya dukungan internasional, terutama dari negara-negara di kawasan Amerika Latin.

²⁵ <http://bontokclub.com/situasi/2008/02/mengenal/20di/20amerika/20latin.htm> akses 03

G. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan (*library research*). Dan bahan-bahan yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal, surat kabar, dokumen yang diterbitkan oleh instansi atau organisasi, data-data dari media internet dan juga makalah-makalah ilmiah yang sesuai atau relevan dengan topik dalam penulisan ini.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan dan scope dari penulisan ini terdiri dari dua faktor, yaitu kurun waktu yang diteliti dan juga wilayah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar dalam penulisan skripsi ini nantinya tidak begitu melebar dan meluas namun akan menjadi terfokus dan terarah. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya dibatasi pada wilayah negara Bolivia dan dalam kurun waktu pemerintahan Bolivia semenjak dipimpin oleh presiden Evo Morales hingga dikeluarkannya keputusan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan asing di negara tersebut. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan penulis mengambil data-data di luar jangkauan ini selama dirasa hal tersebut masih relevan dengan topik yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yaitu meliputi :

- Pada BAB I. Berupa pendahuluan, yang juga merupakan rancangan penelitian dalam skripsi ini. Yaitu berisikan tentang alasan pemilihan judul, maksud dan tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar berpikir, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Pada BAB II. Akan menjelaskan mengenai sosok Evo Morales, latar belakang, karir politiknya beserta ideologi dan persepsinya terhadap kapitalisme dan dalam upayanya memperoleh kekuasaan pada pemerintahan Bolivia.
- Pada BAB III. Disini akan dijelaskan tentang situasi politik dan ekonomi Bolivia setelah keberadaan perusahaan asing di negara tersebut, hingga analisa tentang hal tersebut menimbulkan situasi konflik sosial politik di Bolivia
- Pada BAB IV. Dalam bab ini dibahas mengenai analisa bukti-bukti dukungan dari pihak internasional atas kebijakan Morales dalam menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di negaranya.
- Pada BAB V. Sebagai penutup dari tulisan ini, maka pada bab ini akan berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah